

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 25 Oktober 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman, 18)	Kamis, 25 Oktober 2018	Swasta Dukung Infrastruktur	PT Toshiba Asia Pacific Indonesia berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Perusahaan itu akan berkontribusi lebih jauh dalam memenuhi kebutuhan energy dan infrastruktur di Indonesia.
2	Kompas (Halaman, 21)	Kamis, 25 Oktober 2018	Segera Selesaikan Pendataan Rumah Rusak	Pendataan rumah rusak diharapkan segera selesai. Dengan demikian, jumlah hunian sementara dan waktu pembangunan bisa ditentukan. Sementara itu, keterbatasan tenda membuat sebagian kelas darurat akan dibangun dengan material yang ada di sekitar lokasi.
3	Kompas (Halaman, 21)	Kamis, 25 Oktober 2018	Prioritaskan Pengurangan Risiko	Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran dan program untuk pengurangan risiko bencana.
4	Kompas (Halaman, 22)	Kamis, 25 Oktober 2018	Berita Foto	Penataan Kampung Bahari
5	Kompas (Halaman, 27)	Kamis, 25 Oktober 2018	Urbanisasi dan Kesejahteraan Penghuni Kota	Urbanisasi tidak dapat dihentikan dan dihindari. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat urbanisasi dapat menyejahterakan warga yang tinggal di kawasan yang urban tersebut.
6	Kompas (Halaman, 27)	Kamis, 25 Oktober 2018	Bedah Rumah dan Simpan Pinjam bagi MBR	Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyelesaikan bedah 1.000 rumah tidak layak huni hingga akhir tahun ini.
7	Kompas (Halaman, 27)	Kamis, 25 Oktober 2018	Berita Foto	Proyek Tanggul Laut di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan.
8	Kompas (Halaman, 28)	Kamis, 25 Oktober 2018	Riwayat Bencana Alam di Ibu Kota	Indonesia merupakan negara yang terletak di antara tiga lempeng tektonik. Kondisi ini menyebabkan banyak lokasi di Indonesia rentan sejumlah bencana.
9	Media Indonesia (Halaman, 13)	Kamis, 25 Oktober 2018	Industri Pariwisata Jadi Tumpuan	Ekspor dan pariwisata merupakan salah satu kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.
10	Media Indonesia (Halaman, 13)	Kamis, 25 Oktober 2018	Konektivitas Wilayah Jadi Prioritas	Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai konektivitas yang dibangun dalam konteks Indonesia – sentris menjadi prioritas.
11	Media Indonesia (Halaman, 19)	Kamis, 25 Oktober 2018	Harus Tangguh Hadapi Bencana	Bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat merupakan wake up call kedua setelah kejadian gempa bumi di Aceh pada 2004.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Kamis, 25 Oktober 2018	Sejumlah Proyek Dikebut Tahun Depan	Kementerian PUPR akan mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di kawasan timur Indonesia atau KTI pada tahun depan.
13	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Kamis, 25 Oktober 2018	Capaian Program Sejuta Rumah Diragukan	Pengamat property meragukan capaian program sejuta rumah yang tahun ini diklaim bisa terlampaui, dilihat dari realisasi penyaluran kredit rumah yang tiap tahun sekitar Rp 30 triliun
14	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Kamis, 25 Oktober 2018	Jembatan Batam-Bintan Belum Dilanjutkan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan belum ada kelanjutan proposal dari badan usaha perihal pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 7 km yang diestimasi memakan biaya Rp 4 triliun.
15	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Kamis, 25 Oktober 2018	Menimbang Eskalasi Kontrak Proyek Infrastruktur	Tren melemahnya rupiah hingga melewati Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat mulai terasa dampaknya pada biaya konstruksi proyek <i>multiyears</i> yang sedang berjalan.

Judul	Swasta Dukung Infrastruktur	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	PT Toshiba Asia Pacific Indonesia berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Perusahaan itu akan berkontribusi lebih jauh dalam memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur di Indonesia.		

Swasta Dukung Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS — PT Toshiba Asia Pacific Indonesia berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Perusahaan itu akan berkontribusi lebih jauh dalam memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur di Indonesia.

"Toshiba berencana memberikan kontribusi pada Indonesia untuk berkembang dan maju bersama. Komitmen dasar kami adalah berkomitmen pada manusia dan masa depan," kata Presiden Direktur PT Toshiba Asia Pacific Indonesia Fumihiro Okada pada temu media di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Fumihiro Okada memaparkan, domain bisnis Toshiba berpusat pada infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat modern. Hal ini mencakup, antara lain, infrastruktur sosial, energi, peralatan elektronika, dan berbagai solusi digital.

Sebagai penyedia solusi, berdasarkan data Toshiba Corporation, penjualan pada 2017 mencapai 3,9 triliun yen. Dengan nilai tukar per Rabu, jumlah itu setara 34,7 miliar dollar AS. Jumlah ini terinci menjadi solusi sistem infrastruktur (29 persen), solusi penyimpanan serta perangkat elektronika (21 persen), solusi sistem energi (20 persen), solusi ritel dan percetakan (12 persen), solusi digital (6 persen), dan lainnya (12 persen).

Fumihiro Okada menambahkan, jaringan global Toshiba ada di sejumlah negara, termasuk Jepang, China, Amerika Serikat, India, dan Indonesia. Indonesia memiliki kebutuhan listrik yang tetap tinggi, serta tengah berupaya mempercepat penggunaan energi terbarukan.

"Di Indonesia kami berupaya mendukung peningkatan permintaan proyek-proyek energi dan infrastruktur," kata Fumihiro Okada.

Indonesia memiliki kebutuhan listrik yang tetap tinggi, serta tengah berupaya mempercepat penggunaan energi terbarukan.

Toshiba, antara lain, memasok turbin uap panas bumi dan generator pada unit pembangkit listrik panas bumi Sarulla unit tiga di Sumatera Utara. Perusahaan itu juga memasok turbin uap ultra-superkritikal dan generator di proyek perluasan pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon, Jawa Barat. Toshiba juga memasok turbin hidro dan generator hidro untuk pembangkit listrik Malea, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rasio elektrifikasi menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik terhadap total jumlah penduduk.

"Pada 2017, rasio elektrifikasi kita 95,35 persen. Pada 2018 kami perkirakan 97,8 persen, tetapi realisasi pada triwulan III-2018 sebesar 98 persen," kata Darmin pada acara Forum Merdeka Barat 9 edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (23/10).

Kebutuhan pembangkit listrik berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II-2018, perekonomian Indonesia tumbuh 5,27 persen secara tahunan. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ini ditopang konsumsi rumah tangga, yang porsi nya sekitar 55,43 persen dalam struktur PDB.

Adapun pada semester I-2018, PDB Indonesia tumbuh 5,17 persen.

Iklm investasi

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Prefektur Saitama, Jepang, Kiyoshi Ueda, Rabu (24/10), di kantor Kementerian Perindustrian. Kunjungan ini disebut sebagai perkenalan antara kedua belah pihak.

"Kesempatan ini dipakai Pemerintah Prefektur Saitama melihat iklim investasi di Indonesia. Mereka juga berharap ada fasilitasi bagi pengusaha-pengusaha asal Saitama yang sudah ada di Indonesia," ujar Airlangga se usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu.

Berdasarkan laman Japan External Trade Organization (Jetro), beberapa industri utama ada di Saitama, antara lain komponen otomotif, makanan dan minuman, serta farmasi.

"Pabrik induk Honda dan Nissan ada di Saitama. Penelitian dan pengembangan mereka juga terpusat di sana," tambah Airlangga.

Perusahaan asal Saitama yang beroperasi di Indonesia, antara lain, adalah Honda, Nissan, dan Showa. (CAS/E03)

Judul	Segera Selesaikan Pendataan Rumah Rusak	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 21)		
Resume	Pendataan rumah rusak diharapkan segera selesai. Dengan demikian, jumlah hunian sementara dan waktu pembangunan bisa ditentukan. Sementara itu, keterbatasan tenda membuat sebagian kelas darurat akan dibangun dengan material yang ada di sekitar lokasi.		

Segera Selesaikan Pendataan Rumah Rusak

Pendataan rumah rusak diharapkan segera selesai. Dengan demikian, jumlah hunian sementara dan waktu pembangunan bisa ditentukan. Sementara itu, keterbatasan tenda membuat sebagian kelas darurat akan dibangun dengan material yang ada di sekitar lokasi.

PALU, KOMPAS — Pendataan rumah rusak berat akibat bencana alam di Sulawesi Tengah diminta selesai dalam dua minggu ke depan. Hasilnya bakal menentukan kecepatan pembangunan dan kepastian jumlah hunian sementara bagi para penyintas.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta hal itu saat mengunjungi Kota Palu, Sulteng, Rabu (24/10/2018). Dalam kesempatan tersebut, ia mengunjungi posko pengungsian Petobo dan melihat pembersihan bangkai jembatan kuning di Pantai Talise yang ambruk diterjang tsunami.

Basuki mengatakan, pendataan rumah rusak berat menjadi patokan utama. Apabila jumlahnya sudah diketahui, pihaknya bisa mengetahui jumlah pasti dan waktu penyelesaian pembangunan hunian sementara.

Kementerian PUPR tengah membangun 1.200 unit hunian sementara atau 15.000 bilik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Satu bilik bisa menampung 4-5 orang.

"Pembangunan ditargetkan rampung dua bulan ke depan. Para penyintas akan tinggal maksimal selama 2 tahun sebelum pindah ke hunian tetap," ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Kementerian PUPR untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng Arie Setiadi Murwanto mengatakan, pengerjaan hunian sementara dilakukan serentak di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Hingga akhir bulan ini, pihaknya menargetkan 600 unit bakal terbangun. "Akhir Desember 2018, diperkirakan akan rampung 1.200 unit," kata Arie.

Jembatan Kuning

Basuki mengatakan, pihaknya akan membangun kembali Jembatan Kuning di Pantai Talise. Saat ini, reruntuhannya tengah dibersihkan menggunakan banyak alat berat.

Dari hasil pemeriksaan, menurut Basuki, fondasi jembatan tidak rusak. Untuk memastikan, pihaknya akan melihat lebih lanjut apakah jembatan itu nantinya

akan dibangun di tempat yang sama atau tidak.

"Kami akan desain ulang posisinya, di mana letak pembangunan yang cocok untuk membuat jembatan baru. Untuk memastikan kekuatannya, akan dibuat tanggul karena terjadi subsidensi (penurunan) bibir pantai," ujar Basuki.

Kelas darurat

Di tempat terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, jumlah tenda untuk membangun kelas darurat di lokasi bencana di Sulteng memang belum mencukupi. Untuk mengatasi hal itu, kelas darurat akan dibangun menggunakan material lokal yang ada di Sulteng didukung bantuan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Kami putuskan membangun kelas-kelas darurat dari bahan-bahan yang ada di sana," kata Muhadjir di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukan Kem-

dikbud, jumlah kelas darurat yang harus dibangun di lokasi bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng sekitar 1.400 unit. Sementara itu, jumlah tenda milik Kemdikbud yang bisa dipakai untuk kelas darurat tinggal 46 unit.

Hal ini karena sebagian besar tenda milik Kemdikbud sudah dipakai di lokasi bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Kita punya tenda sebagian besar sudah dipakai di NTB, tinggal 46 buah," ujarnya.

Dia menambahkan, Kemdikbud juga menerima bantuan tenda dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) berjumlah 450 unit. Dari jumlah itu, sekitar 200 tenda telah dikirim ke Sulteng, sementara 250 tenda sisanya dalam pengiriman. Meski sudah mendapat bantuan tenda dari Unicef, jumlah tenda yang dibutuhkan untuk membuat kelas darurat belum mencukupi.

Muhadjir memaparkan, untuk mendukung pembangunan kelas darurat, Kemdikbud mendatangkan material bambu dari Sula-

wesi Barat serta terpal dari Surabaya, Jawa Timur. Kemdikbud mengucurkan anggaran Rp 30 juta untuk pembangunan setiap kelas darurat.

Menurut Muhadjir, saat ini pembangunan kelas darurat menggunakan material lokal sudah dimulai. Dia menyatakan, kelas-kelas darurat itu hanya akan dipakai untuk kegiatan belajar-mengajar selama beberapa bulan. Setelah itu, kegiatan belajar-mengajar akan dilakukan di bangunan sekolah sementara yang dibangun Kementerian PUPR. "Kemdikbud hanya menyiapkan kelas darurat yang kira-kira digunakan dua sampai tiga bulan," kata Muhadjir.

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena penanganan masalah pendidikan di lokasi bencana di Sulteng tidak secepat di lokasi gempa bumi di NTB.

"Saya minta maaf, (penanganan) tidak secepat seperti di NTB. Hal ini karena bencana berantun dan semua sudah kita fokuskan di NTB," ucap Muhadjir. (JOG/IDO/HR)

Judul	Prioritaskan Pengurangan Risiko	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 21)		
Resume	Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran dan program untuk pengurangan risiko bencana.		

Prioritaskan Pengurangan Risiko

MEDAN, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran dan program untuk pengurangan risiko bencana. Investasi dalam pengurangan risiko bencana dapat melindungi masyarakat dari kehancuran hidup, kematian, dan kerusakan harta benda.

"Investasi dalam pengurangan risiko bencana di tingkat nasional sudah cukup besar. Apakah itu sudah cukup? Untuk menjawab, mari kita lihat bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei dalam peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana melalui rekaman video di Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/10/2018).

Willem mengatakan, bencana gempa di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat menjadi tanda betapa pentingnya pengurangan risiko bencana dilakukan sejak awal oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Semua pihak harus menyadari kalau Indonesia berada di cincin api yang sangat rawan bencana.

Apa yang terjadi, kata Willem, menunjukkan kita belum siap sepenuhnya menghadapi bencana, khususnya yang berskala besar. "Tidak banyak yang bisa dilakukan selama *golden time* tiga hari pertama. Bandara lumpuh, jalan darat putus, listrik mati, jaringan telepon seluler tidak tersambung, dan bahan bakar tidak tersedia," kata Willem.

Logistik dan peralatan di daerah bencana pun sangat terbatas, sementara kebutuhan sangat besar. Menurut Willem, baru pada hari kelima upaya tanggap darurat dapat dilakukan. Hal itu membuktikan pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana belum berjalan maksimal. Menurut Willem, di tingkat pemerintah pusat, pengurangan risiko bencana masuk dalam prioritas nasional ke-2 dari lima prioritas nasional.

Setiap rupiah investasi pengurangan risiko bencana dapat menghemat hingga tujuh rupiah ketika bencana terjadi.

Hadir Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Kepala Badan PBB Bidang Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) Asia Pasifik Loretta Hieber Girardet.

Dody mengatakan, pemerintah daerah harus menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas. Penataan ruang harus dilakukan berdasarkan peta bencana nasional dan daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus tegas melarang permukiman di daerah rawan bencana tsunami, likuefaksi, letusan gunung api, banjir bandang, dan longsor. Permukiman di daerah rawan gempa harus dengan konstruksi tahan gempa.

Girardet mengatakan, pemerintah daerah punya peran penting karena lebih memahami risiko bencana lokal. Ia mengajak kepala daerah berkomitmen dalam pengurangan risiko bencana. "Setiap rupiah investasi pengurangan risiko bencana dapat menghemat hingga tujuh rupiah ketika bencana terjadi serta melindungi masyarakat dari kematian, kehancuran hidup, dan kerusakan harta benda," katanya.

Ia berharap pemerintah membangun infrastruktur bandara, jaringan kereta api, dan jalan yang dapat bertahan saat terjadi bencana. Infrastruktur yang bisa bertahan saat terjadi bencana akan sangat membantu di masa tanggap darurat.

Edy Rahmayadi mengatakan, penataan ruang di daerah merupakan salah satu prioritasnya dalam pengurangan risiko bencana. "Banjir bandang di Kabupaten Mandailing Natal menelan 17 korban jiwa karena masyarakat membangun rumah dan fasilitas umum hingga ke pinggir sungai. Padahal, banjir bandang bisa datang sewaktu-waktu. Salah satu yang harus diantisipasi di Sumut adalah gempa besar. Kita tahu hampir semua bangunan di Sumut tidak dibangun untuk tahan gempa," kata Edy.

Edy sudah mengeluarkan surat edaran agar pemerintah kabupaten dan kota di Sumut memprioritaskan anggaran untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. (NSA)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 22)		
Resume	Penataan Kampung Bahari		

Penataan Kampung Bahari



KOMPAS/P. RADITTA MAHENDRA VASA

Kampung nelayan yang mulai ditata untuk menjadi proyek percontohan kampung bahari di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/10/2018). Penataan kampung tersebut meliputi pembangunan dermaga, pasar ikan, infrastruktur jalan, dan permukiman. Ini dilakukan agar kawasan yang sebelumnya kumuh tersebut menjadi layak huni.

Judul	Urbanisasi dan Kesejahteraan Penghuni Kota	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 27)		
Resume	Urbanisasi tidak dapat dihentikan dan dihindari. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat urbanisasi dapat menyejahterakan warga yang tinggal di kawasan yang urban tersebut.		

Urbanisasi dan Kesejahteraan Penghuni Kota

Urbanisasi tidak dapat dihentikan dan dihindari. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat urbanisasi dapat menyejahterakan warga yang tinggal di kawasan yang urban tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Pengertian urbanisasi secara sederhana adalah kawasan yang mengurban atau menjadi kota. Hal ini disebabkan oleh migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota dan memicu kota eksisting terus bertambah penduduknya dan berkembang. Juga karena penambahan penduduk alami di dalam kota.

Selain itu, urbanisasi juga dapat terjadi di kawasan yang sebelumnya bukan kota, tetapi lantas bertransformasi menjadi kota karena berbagai hal, termasuk migrasi penduduk.

Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat Wicaksono Sarosa, Rabu (24/10/2018), seuai The 2nd International Conference of Strategic and Global Studies (ICSGS) di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, mengungkapkan, pertumbuhan kota seharusnya memberi kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. Namun, selama ini yang banyak terjadi, orang berpindah ke kota tanpa disertai keterampilan sehingga akhirnya muncul kemiskinan.

Pada banyak wilayah di pinggiran Jakarta, pengembang besar membangun kota mandiri di daerah yang sebelumnya merupakan desa dengan warga yang bertani. Warga setempat yang tidak dibekali keterampilan memadai akhirnya terpinggirkan dan miskin.

"Persoalan di Indonesia adalah urbanisasi sangat sedikit membawa kesejahteraan. Ini terlihat dari angka setiap 1 per-

sen urbanisasi di Indonesia berpengaruh terhadap kenaikan 4 persen produk domestik bruto (PDB/GDP) per kapita. Bandingkan dengan China yang kenaikan GDP-nya bisa naik 9,1 persen karena urbanisasi," kata Wicaksono.

Saat ini, kata Wicaksono, 56 persen penduduk Indonesia hidup di perkotaan. Ke depan, tahun 2035, diperkirakan jumlahnya meningkat hingga 67-70 persen.

Oleh karena itu, semua pihak harus bersiap. Paradigma lama harus diubah. Pemerintah harus responsif, pihak swasta harus bertanggung jawab, dan sama warga harus saling berempati. Semua orang tanpa kecuali harus dapat mengakses pelayanan dasar. Saat ini, Kemitraan Habitat tengah membahas kebijakan perkotaan nasional dengan pemerintah yang nantinya dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah.

"Kami mendorong penguatan metropolitan di luar Jawa. Sebab, Pulau Jawa, khususnya Jakarta, daya dukungnya sudah tidak memadai. Perlu insentif dan disinsentif dari pemerintah pusat untuk bisa mendorong hal itu," ujar Wicaksono.

Inklusif

Jane M Jacobs, Professor in Urban Studies Yale-National University of Singapore, mencermati bagaimana kota harus menjadi inklusif. Kota yang ideal adalah yang ramah bagi semua, termasuk kelompok-

ompok yang selama ini termarginalkan. "Dalam segala aspek, kota harus mengakomodasi semua kepentingan. Ini bukan hanya bicara soal mereka yang memiliki kebutuhan khusus, melainkan juga yang mengakomodasi segala perbedaan," ujarnya.

Jane juga mengatakan, perlu ada perubahan kebijakan makro untuk membuat kota menjadi kota inklusif, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai sistem, misalnya sistem transportasi dan sanitasi. Implementasi kemudian dilakukan dari hal mendasar.

Itu semua, kata Jane, berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang mencakup berbagai bidang kehidupan. SDGs pada implementasinya perlu diterjemahkan sesuai kondisi dan kebutuhan tiap negara.

Pengajar Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, Mia Siscawati, mengatakan, tema ICSGS tahun ini adalah "Gender, Urban Space and Global Circulation". Jender menjadi bahasan penting dalam pembangunan kota karena menyangkut berbagai aspek kehidupan.

"Selalu ada dimensi jender. Di perkotaan ini sangat penting dalam pengambilan kebijakan yang selama ini kerap berorientasi pada laki-laki, muda, dan sehat. Padahal, itu tidak cukup mewakili kebutuhan seluruh warga kota," tuturnya. (UTI)

Judul	Bedah Rumah dan Simpan Pinjam bagi MBR	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 27)		
Resume	Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyelesaikan bedah 1.000 rumah tidak layak huni hingga akhir tahun ini.		

Bedah Rumah dan Simpan Pinjam bagi MBR

TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyelesaikan bedah 1.000 rumah tidak layak huni hingga akhir tahun ini.

Program bedah rumah itu tercakup dalam program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Kumuh dan Miskin. Sasarannya rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang tersebar di 18 dari 29 kecamatan. Ke-18 kecamatan itu di antaranya Kresek, Jayanti, Balaraja, Tigaraksa, Cisoka, Sukamulya, Jambe, Solear, Sindang Jaya, Kosambi, dan Kemiri.

"Kami akan menyelesaikan bedah rumah ini hingga akhir Desember tahun ini. Mepet, tetapi kami optimistis bedah rumah ini akan selesai sesuai

dengan rencana," kata Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Heru Hendriansyah, Rabu (24/10/2018).

Pelaksana program bedah rumah ini adalah unit pelaksana kegiatan (UPK) di setiap kecamatan sasaran. Fasilitator Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) Kabupaten Tangerang, Chamdani, menjelaskan, sejak 2013 hingga tahun ini, terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang mengikuti program bedah rumah.

Gebrak Pakumis adalah program bedah rumah berbasis kawasan. Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya menata ka-

wasan permukiman penduduk agar sehat dan tertata.

Menurut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dalam kepemimpinannya di periode kedua, 2018-2023, ia bersama Wakil Bupati Mad Romli meningkatkan program Gebrak Pakumis menjadi Gebrak Pakumis Plus.

Dalam program Gebrak Pakumis Plus tersebut, kata Zaki, ada gerakan masyarakat mengatasi kemiskinan melalui simpan pinjam tanpa agunan dan risiko (Gebrak Sipintar). Gebrak Sipintar ini diberikan kepada warga yang sudah mendapatkan program Gebrak Pakumis.

"Dalam program Gebrak Pakumis Plus ini, kami bantu penerima bedah rumah untuk perbaikan ekonomi keluarga dengan

memberikan simpan pinjam melalui koperasi untuk berwirausaha," ujar Zaki.

Salah satu penerima program Gebrak Pakumis dan kemungkinan menjadi kandidat penerima Gebrak Sipintar adalah Rumsah (35), warga Kampung Kebon Nangka, Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri.

Awalnya, rumah Rumsah yang dihuninya bersama suami dan tiga anaknya tidak permanen, ber dinding bambu dan lantainya tanah. Setelah dibedah, rumahnya menjadi permanen dan kembali ditempati pada 2017.

"Sekarang kalau hujan, rumah saya tidak bocor lagi. Kalau angin kencang, kami tidak lagi takut rumah mau roboh," kata Rumsah, beberapa waktu lalu. (PIN)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 27)		
Resume	Proyek Tanggul Laut di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan.		

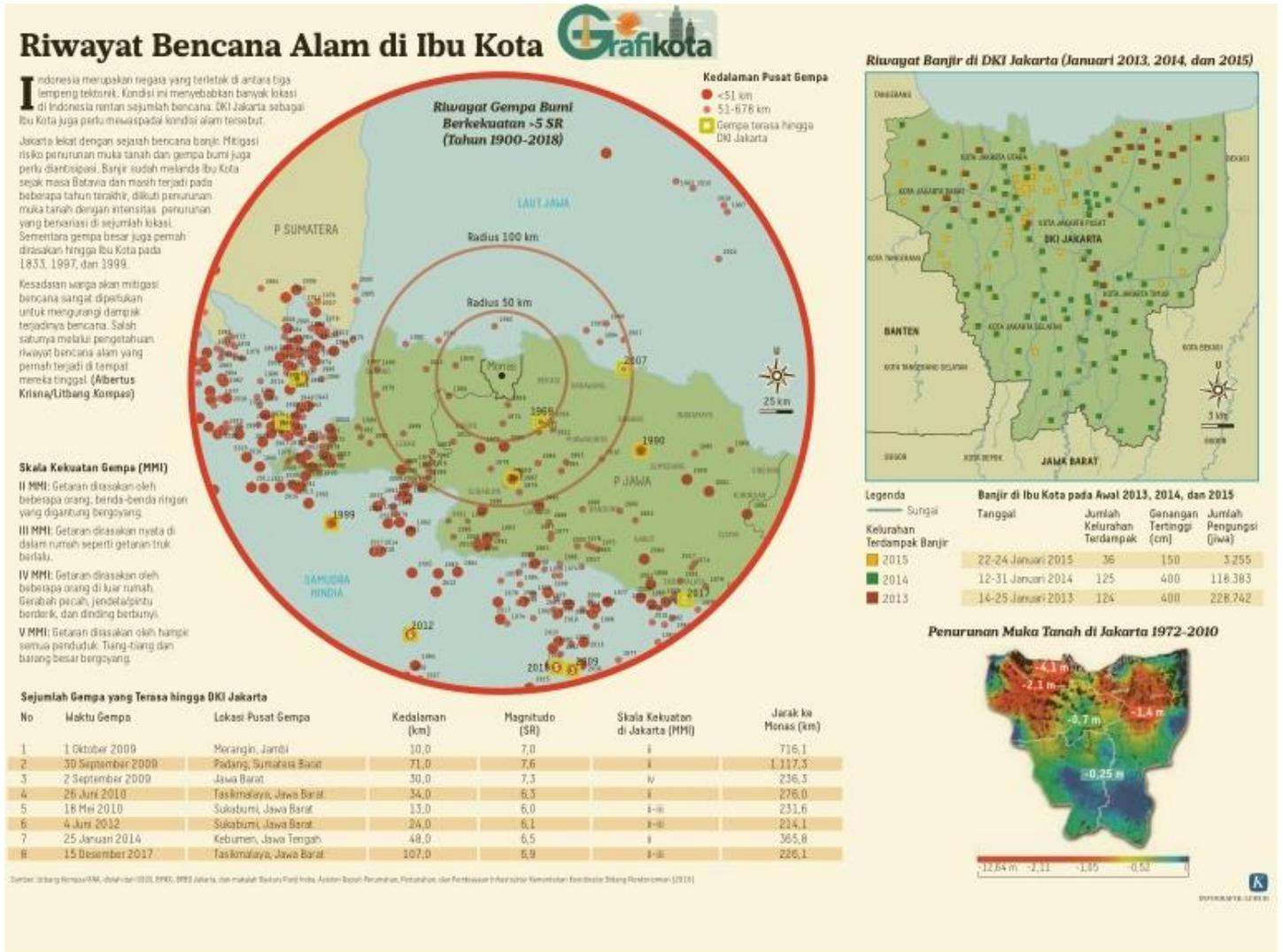
Proyek Tanggul Laut di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan



KOMPAS/HERU SHI KUMORO

Warga memancing ikan dari atas tanggul laut fase A di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara, Rabu (24/10/2018). Pemerintah pusat memastikan akan melanjutkan proyek tanggul laut di Teluk Jakarta sebagai cara menjaga daya dukung lingkungan Ibu Kota pasca-pencabutan izin prinsip dan izin pelaksanaan 13 pulau reklamasi.

Judul	Riwayat Bencana Alam di Ibu Kota	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 28)		
Resume	Indonesia merupakan negara yang terletak di antara tiga lempeng tektonik. Kondisi ini menyebabkan banyak lokasi di Indonesia rentan sejumlah bencana.		



Judul	Industri Pariwisata Jadi Tumpuan	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Ekspor dan pariwisata merupakan salah satu kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.		

Industri Pariwisata Jadi Tumpuan

Ekspor dan pariwisata merupakan salah satu kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

NUR AVANNI

Avanni@mediaindonesia.com

PERTUMBUHAN pariwisata di Indonesia terus meningkat. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan tahun lalu saja angkanya mencapai 22%.

Angka itu, kata dia, di atas rata-rata pertumbuhan wisatawan dunia sebesar 6,4% dan pertumbuhan wisatawan di Asia Tenggara (ASEAN) sebesar 7%.

Untuk kawasan ASEAN, pertumbuhan pariwisata Indonesia hanya kalah dari Vietnam yang tumbuh 29%. 'Negeri Paman Ho', kata Arief, banyak membuat deregulasi yang mendukung kegiatan pariwisata sehingga bisa mendatangkan banyak turis.

"Tapi kita jauh lebih unggul daripada Malaysia yang pariwisatanya hanya tumbuh 4%, begitu juga dengan Singapura (5,8%) dan Thailand (8,7%)," ujarnya dalam pemaparan 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (23/10).

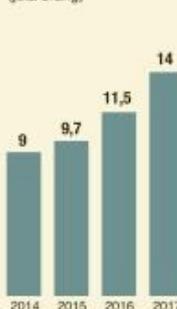
Arief mengungkapkan, kini pariwisata menjadi sektor penghasil devisa keempat terbesar setelah kelapa sawit (CPO), minyak dan gas bumi, serta pertambangan (batu bara). Sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat sejak 2015 dari US\$12,2 miliar menjadi US\$13,6 miliar pada 2016



Penerimaan Devisa di Sektor Pariwisata (miliar US\$)



Realisasi Kunjungan Wisman (juta orang)



Investasi dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Destinasi	Proyeksi 2019		Perukaran Mata Uang Asing (US\$ juta)
	Investasi (US\$ juta)	Kunjungan Wisman (orang)	
Danu Toba	1.600	1.000.000	1.000
Tanjung Kelayang	1.400	500.000	500
Tanjung Lesung	4.000	1.000.000	1.000
Kep Seribu dan Kota Tua Jakarta	1.500	1.000.000	1.000
Borobudur	1.500	2.000.000	2.000
Bromo-Tengger-Semeru	1.400	1.000.000	1.000
Mandalika	3.000	2.000.000	2.000
Labuan Bajo	1.200	500.000	500
Wakatobi	1.500	500.000	500
Morotai	2.900	500.000	500
Total	US\$20.000	10 juta	US\$10 miliar

Sumber: Kementerian Pariwisata/Tin Rasi M. Foto: Antara

dan US\$15 miliar tahun lalu. Tahun ini, pemerintah berharap dapat meraup devisa hingga US\$17 miliar dari sektor pelesiran tersebut dan tahun depan targetnya sebesar US\$20 miliar.

Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga terus melejit. Dari sebesar 9,7 juta pada 2015 menjadi 11,5 juta (2016) dan 14 juta (2017).

"Sampai Agustus 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sudah menca-

pai 10,58 juta dari target 17 juta wisman," ujarnya.

Atasi defisit

Arief berharap pertumbuhan pariwisata dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional, terutama untuk mengatasi defisit transaksi berjalan.

Sebelumnya, pada seminar Reinventing Bretton Woods Committee yang mengambil tema *The shadow of neo protectionism and coping with the challenges of the normalization process*, di sela-sela

pertemuan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan peningkatan ekspor dan pariwisata merupakan sebagian kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Dalam seminar yang membahas bagaimana negara-negara menghadapi bayang-bayang neoproteksionisme dan proses normalisasi kebijakan negara

maju itu, Mirza menyatakan proses normalisasi perekonomian negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), memang membawa dampak global, terutama terhadap negara berkembang, termasuk dari sisi nilai tukar mata uang.

Dalam kondisi global tersebut, kata Mirza, Indonesia sebagai negara yang memiliki defisit transaksi berjalan terus menjaga agar defisit tersebut berada pada level yang aman.

Dengan kebutuhan impor

yang masih besar, semakin penting bagi Indonesia untuk mendorong ekspor dan pariwisata. Berbagai destinasi wisata pun terus dikembangkan agar wisatawan asing memiliki pilihan destinasi selain Bali.

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia ditargetkan terus bertambah, yakni 20 juta orang pada 2020 dan 25 juta pada 2025. "Semua ini diharapkan dapat menambah penerimaan devisa negara," ujarnya. (E-2)

Judul	Konektivitas Wilayah Jadi Prioritas	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai konektivitas yang dibangun dalam konteks Indonesia – sentris menjadi prioritas.		

Konektivitas Wilayah Jadi Prioritas

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai konektivitas yang dibangun dalam konteks Indonesia-sentris menjadi prioritas.

“Kalau kita bicara mengenai Indonesia-sentris, memang Kemenhub menjadi salah satu pihak yang senantiasa harus memberikan yang terbaik melalui penciptaan konektivitas, baik melalui akses darat, laut, maupun udara,” kata Budi Karya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Karena itu, ia menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pembangunan Indonesia-sentris karena ada disparitas harga. “Disparitas harga terjadi karena memang terbatas dan tidak ada angkutan ke Papua, baik dari NTT, Kaltara, dan Natuna. Ini yang secara langsung harus diselesaikan,” tuturnya.

Menurut dia, strategi untuk mengatasi persoalan itu ialah dengan membangun pelabuhan dan bandara, khususnya di beberapa tempat yang menggambarkan kesenjangan tersebut.

Ia menuturkan telah dibangun Bandara Nop Goliat Dekai yang melayani Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Papua, dengan anggaran lebih dari Rp500 miliar untuk menggantikan Bandara Wamena. Hal itu agar pesawat apa pun dapat masuk ke bandara itu dan logistik bisa langsung didistribusikan.

Untuk itu, lanjut dia, pembangunan bandara harus disegerakan agar konektivitas dan suplai logistik berjalan dengan baik. “Kemenhub menyuplai bahan-bahan pokok, sedangkan BUMN menyuplai bahan bakar dan energi. Alhasil, apresiasi pun banyak diberikan masyarakat,” katanya.

Di acara yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan rasio elektrifikasi mencapai 98,05% atau melampaui target yang dicanangkan sebesar 97,1%. “Tahun depan dapat menyentuh angka 99,9%.”

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penyedia listrik tetap berkomitmen meningkatkan layanan. Direktur Keuangan PT PLN Sarwono menegaskan perseroan tak memikirkan kurs rupiah karena hanya berdampak pada pembukuan semata. “Jadi (nilai tukar rupiah) tidak mengganggu investasi kita karena ruginya cuma rugi buku, yang penting kami masih untung walau sedikit,” pungkasnya. (Cah/E-2)

Judul	Harus Tangguh Hadapi Bencana	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 19)		
Resume	Bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat merupakan wake up call kedua setelah kejadian gempa bumi di Aceh pada 2004.		

Harus Tangguh Hadapi Bencana

Warga korban gempa Sulawesi Tengah menjalani pemulihan dan terapi psikososial, sedangkan di NTB, warga korban gempa mulai belajar mandiri.

Puji SANTOSO
puji@mediaindonesia.com

BENCANA gempa bumi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat merupakan *wake up call* kedua setelah kejadian gempa bumi di Aceh pada 2004.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

Willem Rampangilei, menyampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah tidak siap dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana.

"Oleh sebab itu, kita membutuhkan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana (PRB). Upaya ini harus dilakukan secara terus-menerus," kata Willem di depan lebih dari 3.000 peserta dari BPBD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, pada acara peringatan bulan PRB 2018 di Medan, Sumatera Utara, kemarin.

Willem menambahkan, BNPB dituntut untuk selalu siap dan antispasi untuk menghadapi segala kemungkinan bencana.

Dia meminta agar para anggota BPBD untuk tidak bosan membangun ketangguhan menghadapi bencana. "Oleh karena itu, slogan *sustainable resilience for sustain-*

able development harus terus diimplementasikan sebab bencana sangat dinamis. Oleh karena itu, ketangguhan yang kita bangun harus berkelanjutan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Chief of UNISDR Asia Pacific, Loretta Hieber Girardet, mengatakan satu dari cara terbaik untuk membangun ketangguhan ialah untuk memastikan pemerintah dan lembaga usaha, berkewajiban untuk membuat investasi di masa depan.

"Saya mengharapkan agar BNPB benar-benar memperhatikan risiko. Contoh sederhana adalah mengerti risiko terhadap banjir sebelum membangun pabrik di tepi sungai, dan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko tersebut dalam desain pabrik," jelas Loretta.

Sementara itu, dukungan pemulihan pascagempa dan tsu-

nami di Sulawesi Tengah terus mengalir. Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan FKUI/RS Cipto Mangunkusumo, bersama Komunitas Biduan, Bale Nusa Lombok, dan Gala Dana Palu, Sigi, dan Donggala menggelar aksi kemanusiaan di daerah terdampak gempa dan tsunami.

Terutamanya ialah dukungan psikososial untuk para penyintas bencana di tahap tanggap darurat. Terutama menasar pada kelompok rentan, seperti anak-anak, balita, perempuan, ibu hamil, orang tua, dan penyandang disabilitas. "Bantuan pertolongan psikologis diberikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang utamanya memberikan rasa tenang, aman, dan nyaman pada para penyintas bencana setelah mereka mengalami kejadian traumatis," kata Ketua Iluni UI Endang Mariani.

Desa berdaya

Pada bagian lain, warga yang menempati hunian sementara di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, didorong mandiri melalui Desa Berdaya.

"Desa Berdaya ini merupakan program yang terintegrasi antara tempat tinggal, pendidikan, ibadah, dan juga perekonomian. Kita tempatkan satu pendamping di sini," ujar Nur Efendi CEO Rumah Zakat saat peresmian Desa Berdaya, kemarin.

Efendi mengatakan, Desa Berdaya merupakan nama yang dipilih dengan harapan warga terdampak gempa di wilayah ini mampu bangkit kembali, terutama melalui sejumlah program pemberdayaan yang dilakukan Rumah Zakat. (Dhk/Aya/RF/YR/N-2)

Judul	Sejumlah Proyek Dikebut Tahun Depan	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Kementerian PUPR akan mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di kawasan timur Indonesia atau KTI pada tahun depan.		

Sejumlah Proyek Dikebut Tahun Depan

MAKASSAR — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di kawasan timur Indonesia atau KTI pada tahun depan. Komitmen itu bakal meningkatkan daya saing kawasan ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan percepatan pembangunan proyek infrastruktur di KTI menghadapi tantangan sehingga membutuhkan banyak dukungan dan sinergi seluruh pihak terkait.

Sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini dalam proses pembangunan di KTI antara lain jalan, jalan tol, pelabuhan, bandar udara, bendungan, hingga irigasi.

"Untuk beberapa proyek di KTI kami targetkan akan rampung pada 2019," ujar Basuki saat menghadiri Festival Forum KTI di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/10).

Berdasarkan data Kementerian PUPR pada 2017, kontribusi KTI terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Indonesia hanya berada di angka 20%. Sementara itu, 80% dikuasai oleh pangsa kawasan barat Indonesia. Perbedaan kontribusi yang cukup besar itu menunjukkan lebarnya kesenjangan antarwilayah. Fokus pembangunan di KTI diharapkan bisa mengurangi angka kesenjangan di antara kedua wilayah itu. Terlebih lagi, saat ini pemerintah juga tengah berupaya mengencangkan peningkatan daya saing, mengejar capaian indeks daya saing global.

"Pada 2018, Indonesia naik ke peringkat 45 dari 140 negara. Itulah mengapa infrastruktur yang merata dibutuhkan untuk peningkatan daya saing kita," tuturnya.

Langkah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah juga diupayakan melalui sektor transportasi. Pemerintah membangun konektivitas dengan sejumlah proyek pembangunan jalan dan jembatan di kawasan timur.

Pasalnya, konektivitas antarwilayah mendorong pertumbuhan ekonomi di satu daerah. Beberapa proyek di antaranya pembukaan kawasan yang terisolir di KTI, yaitu pembangunan jalan Trans Papua, jalan paralel di

perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, juga pembangunan jalan di wilayah Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Selain membangun infrastruktur di sektor transportasi, saat ini Kementerian PUPR juga tengah memacu perampungan proyek di sektor sumber daya air, termasuk pembangunan bendungan.

Beberapa dari proyek pembangunan itu terdapat di Sulsel, di antaranya Bendungan Karalloe, Passeloreng, dan Bendungan Pammukulu.

Basuki menjelaskan, pemerintah juga fokus membangun bendungan tersebut. Pembangunan bendungan itu dibarengi dengan jaringan irigasi untuk menyalurkan air ke persawahan.

"Di Sulsel itu, hamparan pertaniannya sangat luas. Makanya kita merasa perlu membangun bendungan. Ada juga proyek pembangunan irigasi di Jenelata, Gowa, tetapi ini masih dalam tahap desain," ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyatakan, sebagai pintu gerbang di KTI, Sulsel memiliki banyak potensi untuk mendorong pertumbuhan di KTI.

"Tak hanya dari sektor infrastruktur tetapi juga dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan."

Dia berharap seluruh sektor strategis yang ada di Sulsel bisa bersinergi dan mencapai target pembangunan infrastruktur secara tepat waktu.

"Keunggulan pertanian di Sulsel semakin ditunjang dengan hadirnya bendungan. Ini dibangun akan mempercepat pembangunan di Sulsel," jelas Nurdin.

Pekerjaan rumah untuk Sulsel ke depan, paparnya, yaitu menyelesaikan persoalan daerah terisolir, termasuk di Seko, Luwu Utara. Terlebih lagi menurut mantan bupati Bantaeng dua periode ini, Seko memiliki potensi besar dan bisa menjadi pusat lumbung daging.

Gubernur Nurdin berharap semua pihak bisa membantu membangun Sulsel untuk bisa mendorong pertumbuhan di KTI. Salah satunya melalui Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) yang dinilai bisa menjawab sejumlah persoalan yang ada di KTI. **(a36)**

Judul	Capaian Program Sejuta Rumah Diragukan	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Pengamat properti meragukan capaian program sejuta rumah yang tahun ini diklaim bisa terlampaui, dilihat dari realisasi penyaluran kredit rumah yang tiap tahun sekitar Rp 30 triliun		

Capaian Program Sejuta Rumah Diragukan

JAKARTA — Pengamat properti meragukan capaian program sejuta rumah yang tahun ini diklaim bisa terlampaui, dilihat dari realisasi penyaluran kredit rumah yang tiap tahun sekitar Rp30 triliun.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan program pembangunan rumah untuk masyarakat seharusnya transparan sehingga tujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat optimal.

Menurutnya, pembangunan perumahan seharusnya paralel dengan penyaluran kredit perumahan, baik kredit pemilikan perumahan (KPR) maupun kredit pemilikan apartemen (KPA). Hal ini mengingat penggunaan cicilan KPR/KPA mencapai 75% dari total pembiayaan perumahan.

"Jika pada 2017 disebutkan ada pembangunan sekitar 900.000 unit hunian, semestinya kredit perumahan jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Kenyataannya pada tahun 2017 penyaluran KPR/KPA besarnya sekitar Rp 32,7 triliun," paparnya kepada wartawan, Rabu (24/10).

Dia juga khawatir ada pencatatan ganda terkait dengan kredit yang disalurkan untuk pembangunan perumahan. Dia mencontohkan kredit konstruksi yang disalurkan perbankan untuk properti seha-

rusnya tidak dimasukkan untuk penghitungan pencapaian rumah baru, karena rumah tersebut sudah dihitung lewat penyaluran pembiayaan perumahan bagi konsumen.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kinerja program sejuta rumah pada 2015 telah mencapai sekitar 700.000 unit, pada 2016 mencapai 800.000 unit, dan pada 2017 mencapai 900 unit. Tahun ini, hingga pertengahan Oktober 2018 pembangunan hunian diklaim telah mencapai 850.000 unit, sehingga tahun ini diperkirakan terbangun 1,1 juta unit.

Panangian juga memberi contoh bila ada satu hunian seluas 10 hektare dan ternyata terbangun dan terjual hanya satu hektare, seharusnya yang diklaim hanya 1 hektare tersebut, karena hal itu yang riil dihuni oleh konsumen.

"Yang 10 hektare itu kan baru potensi. Kalau yang laku baru 1 hektare ya sampaikan hanya 1 hektare, jangan 10 hektare."

Panangian juga menegaskan sebaiknya pemerintah tidak *ngoyo* untuk menutup semua defisit perumahan yang jumlahnya sekitar 13 juta unit. Menurutnya, kebutuhan rumah akan selalu bertambah dengan bertumbuhnya jumlah penduduk. Padahal, tidak semua penduduk mampu untuk membeli rumah.

"Backlog itu karena ada anggota

masyarakat yang tinggalnya bukan di rumah sendiri. Hal ini karena memang belum ingin pindah ke rumah sendiri karena dananya terbatas, tapi ada juga yang memang tidak mampu beli."

Untuk yang mampu beli dengan dana terbatas, katanya, bisa dibantu pemerintah dengan penyediaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sedangkan yang tidak mampu, pemerintah cukup menyediakan rumah susun sewa.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A.H sebelumnya mengatakan hingga pertengahan Oktober 2018 pembangunan hunian telah mencapai 850.000 unit.

Dia mengatakan masih memiliki total sekitar 120.000 unit dari Dirjen Penyediaan Perumahan yang belum dilaporkan dan dihitung masuk ke dalam pencapaian program tahun ini.

Kendala pembangunan, katanya, masih berasal dari harga lahan yang semakin mahal dan lokasi yang jauh dari perkotaan. Walaupun demikian, lanjutnya, mulai banyak pemda yang telah mengimplementasikan percepatan perizinan dalam perda.

"Ini juga yang membuat cepat. Kemudahan perizinan yang diharapkan Presiden sudah mulai gencar diterapkan," papar Khalawi.

(M. Rochmad Purboyo)

Judul	Jembatan Batam-Bintan Belum Dilanjutkan	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan belum ada kelanjutan proposal dari badan usaha perihal pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 7 km yang diestimasi memakan biaya Rp 4 triliun.		

Jembatan Batam–Bintan Belum Dilanjutkan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan belum ada kelanjutan proposal dari badan usaha perihal pembangunan Jembatan Batam–Bintan sepanjang 7 km yang diestimasi memakan biaya Rp4 triliun.

Direktur Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Zarkasi mengatakan pihaknya sudah meminta salah satu badan usaha yang tertarik menjadi calon pemrakarsa, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (kode saham ADHI) untuk menyesuaikan studi proyek dengan kondisi saat ini.

Iwan mengatakan ADHI baru mengirimkan minat ketertarikan untuk menjadi pemrakarsa, tetapi belum ada kelanjutan untuk pembaharuan studi kelayakan (*feasibility study/FS*). Sebagai informasi, rencana pembangunan tersebut sebelumnya digagas pada tahun 2005 dan kemudian terhenti, sebelum ADHI kembali menyatakan ketertarikan untuk membangun.

"Kami sudah meminta untuk memperbaharui FS-nya, ini masih FS lama. Sudah pasti ada perbedaan, misalnya dari sisi harga," kata Iwan kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemaparan perihal rencana tata guna atau *land use* dalam proposal baru. Dengan begitu, diharapkan rencana pembangunan jembatan memang akan berdampak untuk mendorong perekonomian wilayah sekitar.

"Jangan sampai membangun tetapi *land use*-nya hanya sedikit, apakah memacu atau tidak," ujarnya.

Direktur Operasi I ADHI Budi Saddewa Soediro mengonfirmasi bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan ketertarikan tersebut. Namun, dia tidak memerinci apakah ADHI akan meneruskan usulan tersebut atau tidak.

"Belum. Belum ada pembahasan lebih lanjut," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (24/10).

Jembatan Batam-Bintan pertama kali diinisiasi oleh Batam Industrial Development Authority (BIDA) pada 2005. Pascastudi kelayakan pada 2012, salah satu perusahaan Korea Selatan disebut-sebut berminat untuk ikut serta dalam proyek ini. Akan tetapi, proyek tersebut batal dibangun.

Pada awal tahun ini, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo untuk pembangunan jembatan sepanjang 7 km yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Dia menyebut beberapa investor asing sudah menyampaikan keinginannya untuk kembali merealisasikan gagasan pembangunan itu dengan bermitra, salah satunya berasal dari investor China.

(Irene Agustine)

Judul	Menimbang Eskalasi Kontrak Proyek Infrastruktur	Tanggal	Kamis, 25 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Tren melemahnya rupiah hingga melewati Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat mulai terasa dampaknya pada biaya konstruksi proyek <i>multiyears</i> yang sedang berjalan.		

Menimbang Eskalasi Kontrak Proyek Infrastruktur

Tren melemahnya rupiah hingga melewati Rp15.000 per dolar Amerika Serikat mulai terasa dampaknya pada biaya konstruksi proyek *multiyears* yang sedang berjalan.

Irene Agustine
irene.agustine@bisnis.com

Kontraktor pun mulai ambil langkah untuk menyisir sejumlah proyek yang dinilai perlu dilakukan eskalasi atau penyesuaian harga kontrak karena imbas semakin merosotnya mata uang Negeri Paman Sam terhadap rupiah.

Direktur Utama Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto mengatakan dengan nilai tukar saat ini mencapai titik terdingginya sejak 1998, kontraktor mulai merasakan adanya perubahan pada biaya pembangunan.

"Mulai terasa klaim eskalasi yang berubah. Eskalasi konstruksi naik, biaya investasi akan naik kan," kata Herwidiakto kepada *Bisnis*, Rabu (24/10).

► **Rencananya, perubahan biaya akibat depresiasi rupiah untuk eskalasi kontrak bakal dilakukan saat addendum akhir Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), sebelum tol beroperasi.**

► **Pelemahan rupiah yang berpengaruh pada harga satuan pekerjaan akan terlihat pada perubahan indeks harga untuk menetapkan eskalasi.**

Saat ini, pihaknya tengah memetakan proyek-proyek yang paling terdampak dan sebagian besar yang akan selesai pembangunannya dalam waktu dekat. Rencananya, perubahan biaya akibat depresiasi rupiah untuk eskalasi kontrak bakal dilakukan saat *addendum* akhir Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), sebelum tol beroperasi. "Saat ini kami pilih ruas-ruas yang terdampak dulu," katanya.

Sebagai informasi, beberapa proyek jalan tol WSKT yang ditargetkan dapat beroperasi pada tahun ini antara lain Pejagan-Pemalang seksi 3 dan 4 (37,3 km), Pemalang-Batang segmen Sewaka-Simpang Susun (SS) Pemalang (5,4 km) dan Pemalang-Batang seksi I dan II (SS Pemalang-Batang) sepanjang 33,8 km, Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,4 km) serta Pasuruan-Probolinggo seksi 1-3 Grati-Probolinggo Timur (32,4 km).

Sebelumnya, saat pelemahan rupiah baru menyentuh kisaran Rp13.700 per dolar AS, Herwidiakto mengatakan eskalasi kontrak belum terlalu mendesak karena sebagian besar material proyek dipasok dari lokal. Seiring dengan semakin melemahnya rupiah terhadap dolar, perubahan pada sisi biaya konstruksi mulai terasa.

RUTIN DILAKUKAN

Dengan terdepresiasinya rupiah, proyek dengan komponen impor yang tinggi memang berpotensi

PENDANAAN INFRASTRUKTUR

Kontraktor mulai mengambil langkah untuk menyisir sejumlah proyek yang dinilai perlu dilakukan eskalasi atau penyesuaian harga kontrak karena imbas semakin melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2015-2019

Kebutuhan Investasi	: Rp4.796,2 triliun
Alokasi APBN/APBD	: Rp1.978,6 triliun (41,3%)
Alokasi BUMN	: Rp1.066,2 triliun (22,2%)
Alokasi Swasta	: Rp1.751,5 triliun (36,5%)

Sumber: Rappenas

Bisnis/Erlangga Adiputra

akan mengalami lonjakan kenaikan biaya. Pada proyek *multiyears*, perhitungan ulang nilai proyek di akhir tahun memang rutin dilakukan. Biasanya, eskalasi yang diajukan berkaitan dengan kenaikan inflasi yang berpengaruh terhadap sejumlah komponen pada pembangunan proyek.

Direktur Operasi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Budi Saddewa Soediro mengatakan kendati sebagian besar material proyek yang dikerjakan di bawah direktoratnya dipasok dari lokal, pihaknya juga merasakan dampak dari pelemahan rupiah, kendati tidak begitu signifikan.

Direktorat yang ditangani Budi spesifik untuk proyek-proyek ADHI di bidang jalan tol, bendungan dan sistem penyediaan air minum (SPAM). "Ada ya, tapi porsi di kami tidak terlalu banyak untuk material impornya. Tidak signifikan untuk di direktorat saya," ujarnya.

Sama halnya dengan WTR, Budi mengatakan pihaknya tengah mengkaji proyek-proyek yang

dinilai perlu melakukan eskalasi kontrak imbas pelemahan rupiah. "Sedang kami kaji karena tidak semua proyek kondisinya sama," ujarnya.

Direktur Wilayah Timur PT Hutama Karya (Persero) Sugeng Rochadi mengatakan eskalasi setiap kontrak proyek relatif sudah ada rumusan, tetapi hal itu di luar hal khusus seperti depresiasi rupiah.

"Untuk proyek *multiyears* bulan ke 13 ada eskalasinya, sehingga sudah terukur kompensasinya. Untuk hal khusus, menunggu kebijakan pemerintah," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Budi Harto menjelaskan pelemahan rupiah yang berpengaruh pada harga satuan pekerjaan akan terlihat pada perubahan indeks harga untuk menetapkan eskalasi.

"Indeks harga diterbitkan oleh BPS [Badan Pusat Statistik] secara bulanan. Indeks harga yang terjadi akan digunakan untuk menghitung biaya penyesuaian atau eskalasi yg diperlukan," jelas Budi. □